

**PEMETAAN KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN PERSAWAHAN
DI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL MAMMINASATA LINGKUP
WILAYAH KABUPATEN MAROS**

**ANDIKA MANDALA PUTRA
G111 14 517**



**DEPARTEMEN ILMU TANAH
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**PEMETAAN KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN PERSAWAHAN
DI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL MAMMINASATA LINGKUP
WILAYAH KABUPATEN MAROS**

**ANDIKA MANDALA PUTRA
G111 14 517**





Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian
pada
Departemen Ilmu Tanah
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin

**DEPARTEMEN ILMU TANAH
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

Judul Skripsi : Pemetaan Konflik Penggunaan Lahan Persawahan Di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata Lingkup Wilayah Kabupaten Maros
Nama : Andika Mandala Putra
Nim : G111 14 517

Disetujui oleh :


Dr. Ir. Zulkarnain Chairuddin, M.P.
Pembimbing 1


Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.
Pembimbing 2


Diketahui oleh:

Dr. Rismaneswati, S.P., M.P.
Ketua Departemen Ilmu Tanah

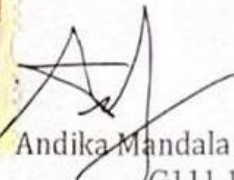
Tanggal Lulus: 06 JULI 2021

Deklarasi

Menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Pemetaan Konflik Penggunaan Lahan Persawahan Di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata Lingkup Wilayah Kabupaten Maros” adalah benar karya saya dengan arahan tim pembimbing, belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Saya menyatakan bahwa, semua sumber informasi yang digunakan telah disebutkan didalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.



Makassar, 01 Juli 2021


Andika Mandala Putra
G111 14 517

ABSTRAK

Andika Mandala Putra. Pemetaan Konflik Penggunaan Lahan Persawahan Di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata Lingkup Wilayah Kabupaten Maros. Pembimbing : ZULKARNAIN CHAIRUDDIN dan SUMBANGAN BAJA.

Latar Belakang. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan perebutan penggunaan ruang atau sawah di daerah-daerah strategis, seperti yang terjadi di Kabupaten Maros pada Kawasan Strategis Nasional Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (KSN Mamminasata). **Tujuan** untuk mengidentifikasi sawah *existing* di Kabupaten Maros berdasarkan data spasial, memetakan lahan persawahan *existing* di Kabupaten Maros yang berpotensi beralih fungsi dan mengkaji potensi konflik penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Maros. **Metode**, Peta Penggunaan Lahan Persawahan yang menjadi dasar pada penelitian ini diinterpretasi dan ditumpang susun dengan Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Maros dan Peta Pola Ruang ditumpang susun dengan Peta Zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mendapatkan gambaran umum potensi konflik penggunaan lahan yang dapat terjadi dan menemukan potensi konflik pada sektor regulasi pemerintah. Dari peta-peta ini kemudian dilakukan tinjauan lapangan untuk mengetahui kondisi aktual penggunaan lahan tersebut serta wawancara petani dengan metode kuisisioner *purposive sampling* untuk mengetahui preferensi pemanfaatan lahan terhadap lahan yang dikelolanya saat ini. Data dari hasil kuisisioner dan tinjauan lapangan selanjutnya ditabulasi dalam bentuk tipologi untuk mendeskripsikan sebaran potensi konflik penggunaan lahan. **Hasil** penelitian menunjukkan, lahan persawahan *existing* di Kabupaten Maros tersebar di dua belas kecamatan yang masuk dalam KSN Mamminasata dengan jumlah luas sebesar 23.736,39 ha. Terdapat 189,44 ha lahan persawahan yang berada pada kawasan permukiman masuk dalam zonasi LP2B dan LCP2B. **Kesimpulan**, pemilik lahan persawahan yang lahannya berada pada kawasan permukiman memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap pemanfaatan lahan yang dimilikinya, sehingga membuat arahan pola ruang tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

Kata Kunci : Mamminasata, Konflik lahan, Pola Ruang, Sawah

ABSTRACT

Andika Mandala Putra. Mapping Of Rice Field Land Use Conflicts In The Mamminasata National Strategic Within The Maros Regency Area . Advisor: ZULKARNAIN CHAIRUDDIN and SUMBANGAN BAJA.

Background. The increase in population has resulted in struggles for the use of space or land in strategic areas, such as what happened in Maros Regency in the Makassar, Maros, Sungguminasa, and Takalar National Strategic Areas (KSN Mamminasata). **Aim** to identify existing rice fields in Maros Regency based on spatial data, map existing rice fields in Maros Regency that have the potential to change functions, assess potential conflicts in rice fields use in Maros Regency. **Method** The rice field land use map which is the basis of this study is interpreted and overlaid with the spatial pattern map of the RTRW of Maros Regency and the spatial pattern map is overlapped with the zoning map of sustainable agricultural food land (LP2B) to get an overview of potential land use conflicts that can occur and find potential conflicts in the government regulatory sector. From these maps, a field review was conducted to determine the actual conditions of land use as well as interviews with farmers using a purposive sampling questionnaire method to determine land use preferences for the land they currently manage. Data from the results of questionnaires and field reviews are then tabulated in typology to describe the distribution of potential land use conflicts. **Results** showed that the existing rice fields in Maros Regency were spread over twelve sub-districts that were included in the Mamminasata KSN with an area of 23,736.39 ha. There are 189,44 ha of rice fields located in residential areas that are included in the LP2B and LCP2B zoning. **Conclusion,** Owners of paddy fields whose land is located in residential areas have different preferences for the use of their land, so that spatial pattern directions cannot be fully implemented.

Keywords: Mamminasata, Land Conflict , Space Pattern, Field

PERSANTUNAN

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, rezeki, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Zulkarnain Chairuddin, M.P. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. dan selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama masa penyelesaian skripsi ini.
2. Kakanda Pratama Putra S.P, Kakanda Iftidah Turahmasyah S.P dan Kakanda Ahmad Fauzan Adzima, S.P. atas bimbingan dan bantuannya dalam penyediaan beberapa data penelitian.
3. Andi Parenrengi, Tegar Ilham Taufan S.P atas bantuan dan dedikasinya dalam pengambilan sampel lapangan.
4. Devi Yusnita S.P, Firly Hamdan Priyono, Rivananda Usman S.P atas bantuannya dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Teman - teman Ilmu Tanah 2014 dan HIMTI yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.

Ucapan terima kasih terkhusus penulis sampaikan kepada Ayahanda Haryanto dan Ibunda Jumiati yang memberi dorongan moril, telah bersabar, dan berdo'a dengan tulus ikhlas hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu berbasis ruang (*spatial*) dalam menata perencanaan penggunaan lahan yang tepat. Serta terima kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurahkan padanya. Aamiin.

Makassar, 01 Juli 2021

Andika Mandala Putra

DAFTAR ISI

DEKLARASI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PERSANTUNAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan kegunaan	2
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Dinamika Penduduk	3
2.2 Penggunaan lahan.....	3
2.3 Alih Fungsi Lahan	3
2.4 Kawasan Strategis Nasional	4
2.5 Kawasan Perkotaan Mamminasata.....	4
2.6 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	4
2.7 Konflik Penggunaan Lahan	5
3. METODOLOGI	6
3.1 Lokasi dan Waktu.....	6
3.2 Jenis dan Sumber Data.	6
3.3 IdentifikasiPeta Penggunaan Laha Persawahan	8
3.4 Tumpang susun peta penggunaan lahan persawahan, peta pola ruang dan peta zinasi lahan pertanian pangan berkelanjutan	8
3.5 Analisis potensi konflik penggunaan lahan dengan tipologi.....	8
3.6 Pembuatan peta potensi konflik penggunaan lahan	9
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Sebaran spasial lahan persawahan.....	10
4.2 Rencana pola ruang dan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.....	12
4.3 Preferensi penggunaan lahan.....	13
4.4 Konflik preferensi penggunaan lahan	15
4.5 Pengelolaan konflik penggunaan lahan.....	17
5. KESIMPULAN	22
5.1 Kesimpulan.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1. Jenis dan sumber data berdasarkan tujuan.penelitian	6
Tabel 4-1. Sebaran dan luas Lahan Persawahan di Kabupaten Maros pada KSN Mamminasata	10
Tabel 4-2. Presentase Preferensi Penggunaan Lahan antara Persawahan dengan Permukiman di Kabupaten Maros	15
Tabel 4-3. Tipologi 1 Konflik Preferensi Penggunaan Lahan antara Persawahan dengan Permukiman di Kabupaten Maros.....	16
Tabel 4-4. Tipologi 2 Konflik Preferensi Penggunaan Lahan antara Persawahan, Permukiman dengan LP2B dan LCP2B di Kabupaten Maros	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Bagan Alir Kerangka Penelitian	8
Gambar 4-1 Peta Sawah Kabupaten Maros Pada Kawasan Perkotaan Mamminasata	11
Gambar 4-2 Peta zonasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Maros Lingkup kawasan Mamminasata.....	13
Gambar 4-3 Tumpang Susun Peta sawah, Pemukiman, dan LP2B LCP2B Kab Maros kawasan Mamminasata.....	14
Gambar 4-4 Peta potensi konflik penggunaan lahan kecamatan Lau.....	18
Gambar 4-5 Peta potensi konflik penggunaan lahan kecamatan Maros Baru.....	19
Gambar 4-6 Peta potensi konflik penggunaan lahan kecamatan Mongcongloe.....	20
Gambar 4-7 Peta potensi konflik penggunaan lahan kecamatan Turikale.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Kondisi persawahan Kecamatan Lau	26
Gambar 2. Kondidi persawahan Kecamatan Maros Baru	27
Gambar 3. Kondisi persawahan Kecamatan Turikale	28
Gambar 4. Kondisi persawahan Kecamatan Mongcongloe.....	29

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan diiringi pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan bertambahnya kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Konsekuensinya adalah terjadi perebutan penggunaan ruang atau lahan di daerah-daerah strategis, seperti yang terjadi pada KSN Mamminasata (Kawasan Strategis Nasional Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Hal ini juga menyebabkan terjadinya arus migrasi penduduk ke kawasan ini terutama di Kota Makassar yang menjadi kawasan perkotaan inti (Febriyanto, 2012).

Kawasan Mamminasata merupakan kawasan pengembangan yang dibentuk akibat pengembangan Kota Makassar yang begitu pesat. Kota Makassar yang saat ini juga berkembang sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Timur menyebabkan pembangunan Kawasan Mamminasata diperuntukkan untuk mengatasi berbagai persoalan, antara lain; masalah lingkungan transportasi, kelangkaan sarana dan prasarana pemukiman, sosial, dan ekonomi. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius karena pembangunan perkotaan sering kali bertentangan dengan pembangunan pertanian khususnya terhadap perlindungan lahan pertanian pangan dan sarana prasarana pendukungnya sering terganggu sehingga memberi dampak yang besar pada masyarakat lokal, salah satunya yaitu Kabupaten Maros terutama yang berada pada kawasan yang mengalami perubahan fungsi ruang tersebut (Widiatri dkk, 2014). Luas wilayah Kabupaten Maros seluas 1.619,12 km² (161.912 ha), wilayah kecamatan yang masuk dalam Kawasan Mamminasata sebanyak 12 wilayah kecamatan seluas 123.784 ha (76,45%) (Perpres no 55, 2011).

Di Kabupaten Maros sebagian besar lahan yang ada digunakan sebagai lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) yaitu 134.690 ha atau sekitar 83%. Di Kabupaten Maros terdapat 2 jenis lahan sawah yaitu sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Luas lahan sawah di Kabupaten Maros sebesar 26.002 ha, dimana sebagian besar berupa sawah irigasi yang mencapai 15.742 ha atau sekitar 60%. Selain sawah irigasi, juga terdapat sawah tadah hujan yang luasnya mencapai 10.260 ha atau sekitar 45 % (BPS Penggunaan Lahan Maros, 2015).

Dari hasil penelitian Chairuddin (2015) menunjukkan luas lahan sawah pada 12 kecamatan yang masuk dalam kawasan Mamminasata adalah 22.344,24 ha. Data tersebut dapat mengindikasikan ada banyak lahan persawahan yang memungkinkan untuk dialih fungsikan, sedangkan disisi lain tidak semua masyarakat mau melepas lahan untuk dialih fungsikan, hal inilah yang memicu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan, sehingga muncul potensi masalah antara keinginan masyarakat dengan kebijakan RTRW yang telah ditetapkan pemerintah dan berpotensi menimbulkan konflik penggunaan lahan.

Untuk mengantisipasi potensi konflik yang dapat terjadi, maka penting untuk mengidentifikasi lahan sawah yang terancam eksistensinya oleh penggunaan lahan yang lain telah diatur dalam kebijakan pola ruang, khususnya penggunaan lahan permukiman, mengevaluasi prasarana dan sarana pengairan yang mendukung produktivitas usaha tani, dan mengkaji kemungkinan terjadinya konflik penggunaan lahan melalui wawancara petani

pemilik lahan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan dasar bagi pemerintah untuk menyempurnakan arahan pemanfaatan penggunaan lahan agar menjadi lebih baik.

1.2 Tujuan dan kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi sawah *existing* di Kabupaten Maros berdasarkan data spasial, (2) memetakan lahan persawahan *existing* di Kabupaten Maros yang berpotensi beralih fungsi, (3) mengkaji potensi konflik penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Maros.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan pemerintah dalam menetapkan perencanaan pemanfaatan penggunaan lahan di Kabupaten Maros.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dinamika Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Maros pada Tahun 2011 berjumlah 322.212 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 41.735 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale 13,8 jiwa/ha, sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa yaitu 0.45 jiwa/ha. Laju pertumbuhan penduduk maros dari tahun 2008-2011 cukup tinggi yaitu 1,7% per tahun karena tingginya angka kelahiran juga adanya urban. Letak Kabupaten Maros dinilai sangat strategis karena merupakan jalur lintas utama ke wilayah Sulawesi Selatan bagian utara lewat darat, dan juga karena letaknya yang bersebelahan dengan Kota Makassar. Kapasitas daya tampung Kota Makassar yang semakin berkurang namun angka pertumbuhan penduduk terus bertambah, sehingga secara otomatis mendorong masyarakat untuk mulai tinggal di daerah sub urban, sehingga Maros akan menjadi tempat permukiman, industri dan infrastruktur pendukung lainnya, yang memacu percepatan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian. (BPS Kabupaten Maros, 2012)

Rencana kawasan Metropolitan Mamminasata selain berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi, penyediaan dan pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros, namun kawasan tersebut secara langsung akan memicu alih fungsi lahan sawah yang akan digunakan untuk perkembangan jalan, perumahan, industri dan lain sebagainya. (Suryawati dan Roy Efendi, 2013).

2.2 Penggunaan lahan

Penggunaan berkaitan dengan aktivitas manusia yang secara langsung berhubungan dengan lahan, dimana terjadi penggunaan dan pemanfaatan lahan dan sumber daya yang ada serta menyebabkan dampak pada lahan. Produksi tanaman, tanaman kehutanan, permukiman perumahan adalah bentuk dari penggunaan lahan. (Baja, 2012)

Penggunaan lahan merefleksikan intervensi manusia atau manajemen pada suatu lahan yang didasarkan pada fungsi atau tujuan tertentu berkaitan dengan kepentingan produksi atau pemeliharaan lingkungan hidup (United Nations 2014). Terkait dengan penggunaan lahannya, daerah pinggiran merupakan wilayah yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan terutama perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan kota di dekatnya (Rahayu, 2009).

2.3 Alih Fungsi Lahan

Faktor yang cenderung mendorong alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian adalah pendapatan disektor non pertanian dan perbedaan harga sewa lahan pertanian dengan pendapatan pertanian. Kedua faktor tersebut pada dasarnya dapat memberikan petani kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik melalui sektor non tani, sehingga petani lebih terdorong untuk melakukan alih fungsi lahan. (Emil, et al 2013)

Penurunan luas lahan pertanian di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat hal ini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan perkotaan maupun kehidupan pedesaan. Mengingat wilayah ini merupakan wilayah yang akan berubah menjadi

kota sepenuhnya di masa mendatang maka perlu komitmen dari penentu kebijakan untuk mengelola dan menata WPU agar menjadi kota yang ideal sesuai dengan konsep kota yang berkelanjutan (Yunus, 2008).

2.4 Kawasan Strategis Nasional

kawasan strategis nasional yang saat ini berjumlah 76 adalah merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena dalam skala tingkat nasional KSN berpengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang didalamnya di tetapkan sebagai warisan dunia (Perpres No. 55 Tahun 2011).

Salah satu KSN tersebut adalah Kawasan Perkotaan Mamminasata, melingkupi Kota Makassar keseluruhan, Kabupaten Maros sebagian, Kabupaten Gowa sebagian, dan Kabupaten Takalar dengan luas wilayah 246.230 Ha. (Perpres No. 55 Tahun 2011)

2.5 Kawasan Perkotaan Mamminasata

Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia (Perpres No. 55 Tahun 2011).

Pengembangan Kota Baru Metropolitan Mamminasata memiliki nilai strategis terhadap Wilayah Kabupaten Maros, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros termasuk dalam rencana pengembangan kota baru tersebut. Pengembangan kota baru tersebut merupakan salah satu arahan dari rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata yang dimaksudkan untuk mengarahkan rencana pengembangan kota untuk menghindari beban kota lama yang makin besar. Wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 km² (103.900 ha) atau 42,2% dari luas wilayah pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata sebesar 2.462 km² atau 246.200 ha (BKPRN, 2011).

2.6 Lahan pertanian pangan berkelanjutan

Proses perlindungan lahan pertanian pangan di Indonesia pada saat ini sedang dilaksanakan, yang diawali dengan identifikasi keadaan aktual lahan keadaan aktual lahan pangan, dan di Jawa dominan diarahkan untuk penyelamatan lahan sawah (Barus, *dkk.* 2012). Penyelamatan harus segera dilaksanakan karena laju konversi lahan sawah atau lahan pertanian pangan lainnya sangat cepat.

Tujuan diselenggarakannya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian (UU No. 41 tahun 2009).

2.7 Konflik penggunaan lahan

Konflik adalah perwujudan perbedaan cara pandang antara berbagai pihak terhadap obyek yang sama, diantara dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki atau merasa memiliki- tujuan yang berbeda (Fisher et al. 2010). Menurut Von der Dunk et al. (2011) konflik penggunaan lahan mengandung unsur isu, kelompok kepentingan dan komponen geografi. Berdasarkan unsur tersebut konflik penggunaan lahan didefinisikan sebagai ketidaksesuaian kepentingan antar kelompok pada suatu unit lahan. Jacobs (2006) menyatakan realitas lanskap muncul dalam 3 fenomena : fisik (matterscape), sosial (powerscape) dan psikologis (mindscape).

Konflik penggunaan lahan didefinisikan sebagai ketidaksesuaian kepentingan antar kelompok pada suatu unit lahan Konflik pemanfaatan lahan yang tak terkendali dapat menyebabkan terganggunya fungsi lahan itu sendiri yang pada akhirnya terjadi degradasi dan fregmentasi lahan serta konversi lahan pertanian pangan, sehingga di pandang penting untuk melahirkan suatu kebijakan berupa undang-undang, peraturan-peraturan maupun program dari pemerintah yang bertujuan mengatur perencanaan penggunaan dan perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan. (Hakim et al, 2016).

3. METODOLOGI

3.1 Lokasi dan waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros pada Kawasan Perkotaan Mamminasata pada bulan Oktober 2019 hingga selesai.

3.2 Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi citra resolusi tinggi 0,6 m tahun 2018 yang diperoleh dari pengolahan data di aplikasi Google Earth serta data lapangan yang terdiri dari data kuesioner dan data *ground truth* atau tinjauan lapangan.

Kuisisioner berisi pertanyaan umum tentang pengetahuan kebijakan pola ruang dan keinginan pemilik lahan dalam pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan sasaran responden adalah petani pemilik lahan persawahan yang lahannya berada pada rencana pola ruang kawasan permukiman yang memiliki luas lahan 0,2 - 0,6 ha. Rentang angka 0,2 - 0,6 ha diambil berdasarkan rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,42 ha (Badan Pusat Statistik, 2013). Pemilihan responden sesuai dengan batas-batas tujuan yang bersifat representatif (Wicaksono et al,) dengan jumlah 100 responden.

Tabel 3-1. Jenis dan sumber data berdasarkan tujuan penelitian

Tujuan	Jenis data	Sumber data
Mengidentifikasi sawah <i>existing</i> di Kabupaten Maros	-Penggunaan lahan persawahan <i>existing</i> skala 1:50.000	- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros
Memetakan lahan persawahan di Kabupaten Maros yang berpotensi untuk beralih fungsi.	- Rencana pola ruang skala 1:50.000	- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros
Mengkaji potensi konflik Penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Maros	- Zonasi kawasan LP2B dan LCP2B skala 1:25.000 - Kuesioner dan <i>ground truth</i> - Citra resolusi tinggi 0,6 m - Peta administrasi desa skala 1:100.000	- Kajian Tipologi Optimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kawasan Mamminasata (Chairuddin, 2015) - Survei lapangan - Google Earth - Potensi Desa, Badan Pusat Statistik

Ground truth dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dan mendokumentasikan data yang diperlukan. Selain itu juga mengambil